

JURNAL

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG

ARTIKEL ILMIAH

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

INTAN FIKRIANI

NIM.105010107111072



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata
Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang

Oleh

INTAN FIKRIANI

105010107111072

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.istislam, SH, MHum
NIP. 19620823 198601 1002

Lutfy Effendi, SH, MHum
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfy Effendi, SH, MHum

NIP. 19600810 198601 1 002

**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG.**

ABSTRAK

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema permasalahan pelanggaran tata tertib bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib hukuman disiplin. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud yuridis sosiologis yaitu digunakan untuk mengkaji yang lebih menekankan pada aspek-aspek hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta mengaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran sanksi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang mengalami kendala yaitu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Tahanan, Efektif Hukuman Disiplinnya menunggu putusan Pengadilan, setelah menjadi Narapidana baru bisa Hukuman Disiplinnya dilaksanakan.

Kata Kunci : Tata Tertib, Lembaga Pemasyarakatan

The Implementation of Administrative Sanction For Detainees Who Contravene The Orderliness at Class I Penitentiary

ABSTRACT

In this paper the author of the theme issue disciplinary offense for prisoners in prison Class I Malang in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 6 of 2013. The background of the case is higher number of detainees who are dauntless enough to contravene discipline and orderliness. This paper the author uses sociological juridical approach is sociological jurisdiction that is used to assess a greater emphasis on the legal aspects in the implementation of administrative penalties for prisoners who violate the order within the Penitentiary Class I Malang as well as listed in the Minister of Justice and Human Rights 6 of Year 2013 concerning rules Correctional Institution and State Prison and associate with the reality that occurs in the community regarding the implementation of administrative penalties for prisoners who violate the rules of discipline in the Penitentiary Class I Malang.

From the research, the authors obtained the answers to the problems that exist, that the implementation of administrative sanctions For prisoners in the Penitentiary Class I Malang experiencing problems which concerned still existed as Prisoners, Effective Discipline punishment awaiting the Court's decision, after becoming a new inmate can Punishment discipline implemented.

Keywords: Violation of Rules in Correctional Institutions Class I Malang

PENDAHULUAN

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan

Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.

Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci sanksi administrasi yang diberikan, kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan memahami kendala-kendala yang muncul

ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa sanksi administrasi bagi warga binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan ?
3. Kendala apa saja yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Yang dimaksud yuridis sosiologis yaitu digunakan untuk mengkaji yang lebih menekankan pada aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang seperti halnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta mengaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat mengenai pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, lokasi ini dipilih karena di dalam instansi pemerintahan tersebut terdapat permasalahan yang

berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin dalam hal pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang karena di Instansi tersebut merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kota Malang dan masih banyak warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dibutuhkan atau yang akan dicari yaitu di Lembaga Pemasyarkatan Kelas I Malang terkait Tentang Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan, dalam permasalahan pelanggaran Tata Tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan, berikut dengan pelanggaran apa yang dilakukan serta sanksi-sanksi untuk mengatasinya.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran kepustakaan (*library research*) yang mendukung data primer, antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer berasal dari hasil wawancara dengan pejabat atau anggota Lembaga Pemasyarakatan baik terstruktur ataupun tidak struktur sebagai responden penelitian. Responden penelitian ini adalah sejumlah pejabat dan/atau staff anggota Lembaga Pemasyarakatan yang berwenang dalam pelaksanaan tata cara penyelesaian sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk memberikan informasi serta data yang terkait dengan permasalahan, yaitu :

- 1) Kepala Bidang Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - 2) Petugas Pemasyarakatan (Sipir), Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang
 - 3) Para Pihak terkait
- 2) Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan – bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Buku kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan Data Primer

Didalam suatu penelitian data Primer dalam diperoleh penulis dengan melakukan penelitian lapangan. Dalam definisi yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik lembaga dan organisasi kemasyarakatan (social) maupun lembaga – lembaga pemerintah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode wawancara. Wawancara dalam penelitian lapangan ini dilakukan kepada para pejabat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan serta kepada para warga binaan pemasyarakatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan dengan melakukan studi pustaka, dokumentasi, data arsip, data resmi dari instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, baik dengan literatur – literatur, penelusuran situs dalam internet, peraturan perundang – undangan dari berbagai sumber lainnya.

E. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu / unit atau seluruh gejala / kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib.
- b.** Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Penelitian ini mengambil sampel dengan cara purposive sampel, dimana sampel diambil dengan asumsi bahwa sampel terpilih melalui permasalahan yang dikaji. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Keamanan dan Tata Tertib dan Petugas Pemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan proses

pemberian Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

F. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Data-data yang diperoleh kemudian direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan data yang diperoleh dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan sanksi administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional dituangkan guna menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-variabel yang dianalisis atau untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi administrasi adalah penjatuhan hukuman yang dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Petugas Pemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan penjara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, ini di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, tujuan hukuman disiplin disini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.¹

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Harno, Kabid Tatib, Pada Tanggal 11 November 2014, pukul 09.00 WIB

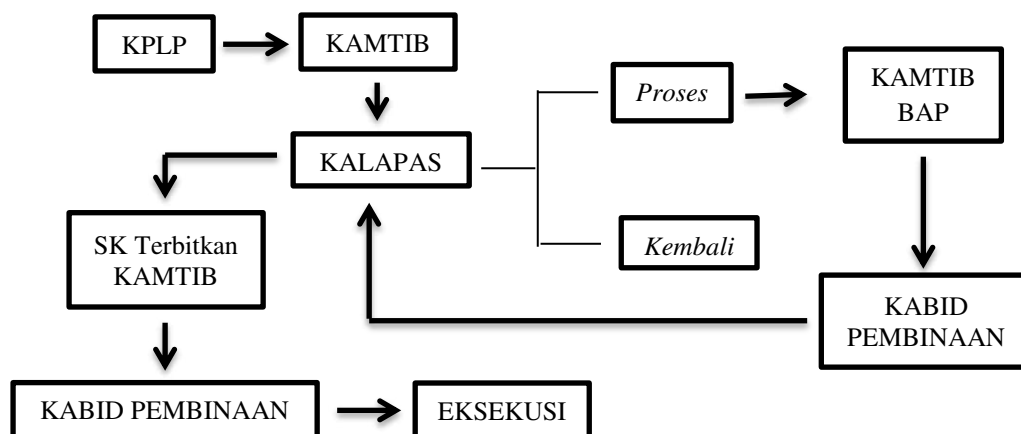
Tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. memberikan peringatan secara lisan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Alur Mekanisme Pelanggaran Disiplin



Sumber : Data Primer diolah November 2014

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut karena penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkoba di dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang telah memakai Peraturan tersebut.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.

Teori yang digunakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga

harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dari laporan ringkasan berita acara pemeriksaan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lapas adalah penyalahgunaan mengkonsumsi narkoba dan membawa handphone di dalam lingkup Lapas.

Narapidana berinisial AY (31) narapidana kasus narkoba mengatakan bahwa dirinya melakukan pemukulan terhadap salah satu napi di dalam Lapas kelas I Malang dan telah menyesal bersalah dan tidak akan mengulangi lagi serta bersedia ditindak sesuai peraturan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan memohon agar dihukum seringan-ringannya, tidak dicabut remisinya dan tidak dipindahkan.²

Berbeda dengan Narapidana berinisial AY, Narapidana Berinisial RH (28) narapidana kasus narkoba ini ketahuan sedang membawa 1 unit handphone yang dia beli pada salah satu napi yang pada waktu itu mau bebas dengan harga 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) lengkap dengan kartu dan chargernya, dia mengatakan bahwa menyimpan handphonenya di almari pakaian, kalau tidak butuh dia sembuhkan diluar depan kamar blok V kamar 2 dengan cara dipendam.³

Kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang sudah efektif

² Hasil wawancara dengan Narapidana yang melakukan pelanggaran bernisial AY pada tanggal 15 November 2014, pukul 10.00 WIB

³ Hasil wawancara dengan Narapidana yang melakukn pelanggaran berinisial RH pada tanggal 15 November 2014, pukul 10.00 WIB

karena menggunakan dan melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan peraturan lain yang sudah ada. Dalam segi sasarannya dapat dilihat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu narapidana misalnya berupa denda administratif yang diberikan.

Kendala yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib yaitu : ⁴

1. Yang bersangkutan masih berstatus sebagai Tahanan
2. Efektif hukuman disiplinnya menunggu putusan Pengadilan, setelah menjadi Narapidana baru bisa Hukuman Disiplinnya dilaksanakan.

Tahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dan selama proses tersebut tersangka atau terdakwa di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Pihak - pihak yang berhak menahan adalah :

- a. Penyidik, yaitu polisi atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan pengumpulan bukti
- b. Penuntut Umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
- c. Hakim, baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, yaitu pejabat

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Harno Kabid Kamtib 14 November 2014, pukul 09.00 WIB

Umumnya orang menganggap bahwa ditahan sama dengan dipenjara, Padahal tidak demikian, Seseorang ditahan jika diduga keras melakukan kejahatan, karenanya untuk sementara dia dimasukkan ke dalam tahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dari perkara yang disangkakan kepadanya. Berarti dia belum tentu bersalah dan bisa saja dibebaskan bila dalam penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tidak ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Sedangkan seseorang dipenjara karena dia telah terbukti melakukan kejahatan dan telah menerima keputusan hakim (vonis) yang bersifat tetap.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LAPAS selama ini sudah maksimal. Dalam memberikan Sanksi Administrasi yaitu berupa Pelanggaran Disiplin kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di dalam LAPAS, Upaya-upaya yang dilakukan Petugas LAPAS dalam memberikan Sanksi Administasi juga dinilai sudah konkrit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat melakukan hukuman terhadap yang bersangkutan berstatus tahanan, namun menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan terlebih dahulu sampai menjadi Narapidana baru bisa hukumannya diberikan.

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 yaitu pelanggarannya berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Di berlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan hukuman disiplin sebagai

bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, rasa keadilan dan keamanan di dalam sel pemasyarakatan lebih diutamakan, jika warga binaan pemasyarakatan pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka petugas akan memberikan sanksi yang setimpal dan pastinya sanksi yang diberikan akan lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya, namun hanya dapat dijatuhi satu hukuman saja.
3. Kendala yang muncul ketika dalam memberikan sanksi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib cukup menyulitkan pihak petugas Lapas, karena petugas Lapas dituntut untuk menjaga ketertiban yang ada di dalam sel. Namun, pihak Lapas tidak berkewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada tahanan, selain itu tahanan itu sendiri juga menjadi sebuah kendala bagi pihak petugas Lapas karena status seorang tahanan masih belum bisa dipastikan apakah dia bersalah atau tidak dan menunggu putusan terlebih dahulu dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan dari Mahkamah Agung.

B.Saran

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan

Negara harus benar – benar diterapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang telah menjadi tujuan dapat tercapai.

2. Pada umumnya pelaksanaan sanksi administrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dapat dikatakan baik, walaupun demikian penulis mencoba untuk memberi saran yang mungkin dapat bermanfaat yaitu lebih ditingkatkan dalam sosialisasi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai Hukuman Displin, karena masih banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang masih belum mengerti Hukuman Displin, sehingga melakukan Pelanggaran tersebut.
3. Pemahaman yang komprehensif pada Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai Sanksi Administrasi berupa Hukuman Displin yang melanggar Tata Tertib di Dalam Lapas agar tidak melakukan pelanggaran yang sama terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal 92.
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 2006, hal.108
- Ibid
- P.A.F. Lamintang, Hukum Penitesier Indonesia, Armico, Bandung, 1994, hal.182
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963, hal 21.
- Samosir Djisman, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal., 4
- Yusafat Rizako, Implementasi Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Fisif-UI, 2009, hal 25-26.